



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI  
DENGAN PLT. DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)  
DAN KEPALA BPH MIGAS**

---

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Plt. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Kepala BPH Migas
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 28 Agustus 2018
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 19.40 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: H. Tamsil Linrung (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F. PKS)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ... Orang dari 49 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Acara	: 1. Progres Produksi Hulu Migas PT Pertamina sampai dengan bulan Agustus 2018 2. Progres Penyaluran BBM PSO dan <i>non PSO</i> sampai dengan bulan Agustus 2018 3. Progres LPG 3 Kg subsidi dan <i>non subsidi</i> sampai dengan bulan Agustus 2018 4. Implementasi program B20 5. Implementasi Sub Penyalur BBM 6. Lain-lain

**KESIMPULAN/ KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 dibuka pukul 13.20 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI H. Tamsil Linrung, dan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Progres Produksi Hulu Migas PT Pertamina sampai dengan bulan Agustus 2018
  - b. Progres Penyaluran BBM PSO dan *non PSO* sampai dengan bulan Agustus 2018
  - c. Progres LPG 3 Kg subsidi dan *non subsidi* sampai dengan bulan Agustus 2018
  - d. Implementasi program B20
  - e. Implementasi Sub Penyalur BBM
  - f. Lain-lain

## II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi kinerja PT Pertamina (Persero) di sektor hulu dan meminta PT Pertamina (Persero) untuk terus meningkatkan produksi dengan melakukan optimasi teknologi dan melakukan eksplorasi di dalam negeri mengingat *lifting* minyak yang menunjukkan kecenderungan menurun.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk terus melakukan pengawasan dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sehingga tepat sasaran sesuai kebutuhan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan.
3. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk merekomendasikan kepada Kementerian ESDM RI terkait pemberian sanksi kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga BBM yang tidak pernah hadir dalam rapat verifikasi volume dan rekonsiliasi iuran yang dilaksanakan BPH Migas di tahun 2016 dan 2017.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) untuk berkoordinasi dengan pihak terkait (Pemerintah Daerah) dalam upaya percepatan implementasi sub penyalur.
5. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan keadilan Komisi VII DPR RI bersama BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) mendukung upaya pemanfaatan dana desa untuk pembentukan sub penyalur di daerah tertinggal, terpencil dan terluar (3T).
6. Komisi VII DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) untuk memberikan layanan informasi yang akurat dan *up to date* atas proses perizinan kemitraan untuk pelayanan publik mengenai persyaratan dan batas waktu respon PT Pertamina (Persero) atas pengurusan izin tersebut.

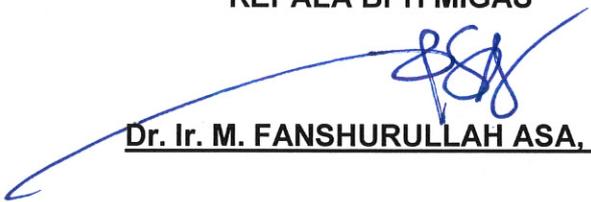


7. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 4 September 2018.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 19.40 WIB

**KEPALA BPH MIGAS**



**Dr. Ir. M. FANSHURULLAH ASA, MT**

Jakarta, 28 Agustus 2018

**KETUA RAPAT,**



**H. TAMSIL LINRUNG**

**DIREKTUR HULU  
PT PERTAMINA (PERSERO)**



**Dr. Ir. SYAMSU ALAM MT**